

KELUARGA

Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
September 2018 Th. IV, Vol. 4, No. II

Keluarga terbit dua kali setahun pada edisi Februari dan September yang berisi kajian ilmiah dan hasil penelitian

PENERBIT
PROGRAM STUDI PKK FKIP
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL KELUARGA

Jurnal Ilmiah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
September 2018 Th. IV, Vol. 4, No.2

Daftar Isi	Hlm.
Pengaruh Pola Makan Terhadap Kecukupan Gizi Mahasiswa Asrama Kalimantan Utara di Yogyakarta Anavica Yunestia Naftali	83-89
Pengaruh Pengetahuan Makanan Instan Terhadap Konsumsi Makanan Jajanan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Ely Murdiati	90-96
Motivasi Siswa Memilih Program Keahlian Tata Boga di Sekolah Menengah Kejuruan Esti Jannah, Widjiningsih	97-101
Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Keterampilan Menjahit Siswa Tata Busana di Sekolah Menengah Kejuruan Istikhomah	102-110
Kesiapan Kerja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Tata Busana Jumariah	111-114
Pengembangan Media Power Point Menggambar Bagian-Bagian Tubuh Wanita Pada Mata Pelajaran Desain Busana Marsiani, Prapti Karomah	115-121
Pengembangan Modul Sulam Pita dan Variasinya pada Mata Pelajaran Menghias Busana Meylia Endah Dwi Pratiwi	122-130
Diversifikasi Tepung dalam Pembuatan Cake Terhadap Kesukaan Konsumen Mifahur Rohmah	131-136
Peran Pendidikan Vokasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Menghadapi Tantangan Zaman Nur Wahyuni	137-147
Implementasi Layanan Bimbingan Karier di Sekolah Menengah Kejuruan Yusrawati	148-154

PERAN PENDIDIKAN VOKASI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ZAMAN

Nur Wahyuni

nuryuyun30@gmail.com

Dosen AKS-AKK Yogyakarta

ABSTRAK

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan vokasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler guna menghadapi tantangan zaman. Dalam pembelajaran, anak berkebutuhan khusus memiliki karakter dan modalitas berbeda dengan peserta didik normal. Untuk itu, pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar agar bermakna sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan karakter dapat diwujudkan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada pada diri anak didik yang ditandai dengan pembelajaran ramah anak. Implementasi pendidikan karakter pada sekolah reguler ditandai dengan pembelajaran ramah anak, berempati, pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sekolah perlu melakukan asesmen identifikasi kebutuhan peserta didik, melengkapi sarana prasarana berbasis Anak Berkebutuhan Khusus dan aksesibilitas sekolah ramah anak. Dengan demikian kurikulum, pembelajaran, interaksi, serta penilaian pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Inilah nilai karakter yang sebenarnya, yaitu pembelajaran yang menghargai peserta didik. Pembelajaran Keterampilan dan Kecakapan Hidup Bagi Anak berkebutuhan khusus diperlukan oleh setiap individu dalam upaya kelangsungan hidupnya.

Kata Kunci: *Peran Pendidikan Vokasi, Anak Berkebutuhan Khusus.*

ABSTRACT

Vocational education is an education that supports the mastery of certain applied skills. This paper aims to examine the implementation of vocational education for Children with Special Needs (ABK) in regular schools to face the challenges of the times. In learning, children with special needs have different characteristics and modalities with normal learners. For that, approaches, methods, techniques, and learning tactics need to be tailored to the learning needs to be meaningful in accordance with children with special needs. The Government Regulation of The National Education No 70 of 2009. The character education can be realized by actualizing the values that exist in the students themselves are characterized by child-friendly learning. Implementation of the character education in regular schools is characterized by child-friendly learning, empathy, learning centered on learners, and pursuit in accordance with the learning needs of learners. Schools need to assess the needs of learners, complement the means of infrastructure based on Children with Special Needs and accessible school children friendly. Thus the curriculum, learning, interaction, and assessment of learning will be tailored to the needs of learners with special needs. This is the true value of the character, the learning that respects the learners. Life skills and life skills learning for children with special needs life skills are required by every individual in their survival efforts.

Key Words: *The Role of Vocational Education, Children with Special Needs*

PENDAHULUAN

Pendidikan, termasuk pendidikan vokasi, memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh, yang mencakup pengembangan daya pikir, daya qolbu, daya fisik, dan penguasaan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga. Selain itu, pengembangan manusia juga diharapkan menghasilkan manusia yang mampu dan sanggup berperan aktif dalam membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Layanan pendidikan (dan pelatihan) vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMK-Luar Biasa, serta jenjang pendidikan tinggi, yakni

Politeknik dan program Diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur formal (persekolahan, seperti SMK) maupun nonformal melalui kursus dan pelatihan keterampilan.

Pendidikan vokasi pada jalur pendidikan nonformal dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui berbagai satuan pendidikan nonformal, baik di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Latihan Kerja (BLK), maupun berbagai lembaga pelatihan lainnya. Pendidikan vokasi yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk magang atau “terjun langsung” ke lapangan kerja yang akan dimasuki.

Pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan keterampilan pada tahun 1970an diselenggarakan dibawah binaan Direktorat Pendidikan Kejuruan. Pada tahun 1975 pembinaan kursus dan pelatihan keterampilan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program kursus dan pelatihan keterampilan dikenal dengan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM) dan selanjutnya pada tahun 1990an dikenal dengan akronim Diklusemas. Pada waktu itu belum banyak program-program kursus yang berkembang di masyarakat, antara lain kursus Tata Buku atau Bond A/B, Mengetik, Bahasa Inggris, Tata Kecantikan, Tata Rias Pengantin, Menjahit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan industri, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyusun kurikulum berbagai program kursus dan melaksanakan ujian nasional kursus.

Pada tahun 2006 terbentuk direktorat baru sebagai pemisahan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, yaitu Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan kemudian berubah menjadi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pada tahun 2009 ujian nasional kursus diganti dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sampai sekarang sudah terbentuk 35 jenis Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

Dalam perkembangannya pendidikan vokasi yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah tetap disebut pendidikan vokasi dan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi juga disebut pendidikan vokasi. Pada saat ini, secara regulasi Program Pendidikan Kejuruan di Indonesia terbagi dalam program pendidikan 3 tahun, dan program pendidikan 4 tahun. Namun, jumlah SMK 4 tahun hanya ada 12 SMK dari 12.848 SMK. Bidang Keahlian yang dikembangkan terdapat 9 Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 Paket Keahlian. Selain dari pendidikan (dan pelatihan) kejuruan yang dilaksanakan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja (*pre-service training* atau pelatihan pra-jabatan), terdapat pelatihan kejuruan yang dilaksanakan setelah lulusan masuk ke dunia kerja (*in-service training* atau pelatihan dalam jabatan). Pelatihan-pelatihan semacam ini dilaksanakan oleh perusahaan, industri, atau tempat kerja untuk menyiapkan karyawan baru agar menguasai keterampilan yang benar-benar sesuai dengan tempat kerja yang dimasukinya.

Dalam rangka melaksanakan efisiensi pendidikan (dan pelatihan) kejuruan diperlukan sinkronisasi antar-berbagai pola tersebut. Sinkronisasi pertama adalah antara pihak penyelenggara moda pelatihan pra-jabatan dan penyelenggara pelatihan dalam jabatan. Sinkronisasi kedua adalah antara para pemberi layanan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan. Kedua jenis sinkronisasi ini belum tampak wujudnya dalam penyelenggara pendidikan (dan pelatihan) kejuruan. Namun, fokus perhatian tulisan ini dibatasi hanya untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, “Ilmu-ilmu apa sajakah yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik pendidikan vokasi Indonesia agar kelak menjadi manusia seutuhnya dan berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa Indonesia?” Jawabnya jelas, yaitu “Semestinya ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta didik pendidikan vokasi di Indonesia adalah ilmu-ilmu yang mampu memfasilitasi pengembangan peserta didik dan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 45. Kedua, “Bagaimanakah caranya mengelola pendidikan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus agar perannya bisa optimal?” Pendidikan vokasi harus mulai mencurahkan perhatiannya terhadap kebutuhan/kearifan lokal (daerah) seraya tetap memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan

internasional. Mengingat pendidikan vokasi lebih dekat keselarasannya dengan perekonomian dan khususnya dengan ketenagakerjaan, sisa tulisan ini difokuskan pada pembahasan pentingnya penyediaan dan peningkatan kualitas guru bagi anak berkebutuhan khusus. keselarasan antara pendidikan vokasi sebagai pemasok tenaga kerja dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan pendidikan vokasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pengembangan peserta didik seutuhnya dan pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk itu, berturut-turut akan dipaparkan: (1) kajian peran pendidikan vokasi bagi ABK melalui SMA LB; (2) Tuntutan kemampuan, ketrampilan dan kemandirian dalam LKSN ABK; (3) Pentingnya penyediaan dan peningkatan kualitas guru ABK dan (4) memaksimalkan peran pendidikan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus, dan kemudian diakhiri dengan penutup.

Kajian Peran Pendidikan Vokasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui SMA LB

Anak Berkebutuhan Khusus pada awalnya dikenal sebagai Anak Luar Biasa (ALB), sehingga pendidikannya juga dikenal sebagai **Pendidikan Luar Biasa (PLB)**, dimana UU No. 2 tahun 1989 pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa". Pada masa itu lembaga pendidikannya juga dikenal sebagai **Sekolah Luar Biasa (SLB)**.

Perkembangan selanjutnya dalam bidang pendidikan **pasal 5 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003** mengganti istilah Pendidikan Luar Biasa menjadi Pendidikan Khusus dengan menjamin bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Selain itu ayat 4 juga menjamin bahwa "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus". Jadi kelainan ditinjau dari kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya lembaga pendidikan bagi ABK dapat kita pahami atas dasar UU No. 20 tahun 2003 **Pasal 15** yakni Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan pasal 32 ayat 1

UU No. 20 Th 2003 menegaskan bahwa "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus/sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif. Pendidikan khusus disediakan untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu), hambatan intelektual (tunagrahita), tunadaksa dan autisme. Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan secara terpisah dengan anak-anak pada umumnya. Adapun pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah umum sehingga anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya, dan sekolah mengakomodasi semua kebutuhan anak dengan berbagai keragamannya.

Kurikulum yang terkait dengan program vokasional dan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah khusus menjadi prioritas utama, yang disusun dalam perbandingan 40% akademik dan 60% vokasional. Pembelajaran keterampilan hidup dan kerja (program kemandirian) merupakan hal yang penting bagi kehidupan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), sehingga porsi lebih besar. Hal itu dimaksudkan agar setelah menyelesaikan sekolah, keterampilan itu dapat digunakan untuk bekerja dan hidup secara mandiri.

Berdasarkan Dapodik bulan Mei 2016, jumlah satuan pendidikan khusus sebanyak 2.059 sekolah yang terdiri SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan jumlah PDBK sebanyak 118.846 orang.



Gambar 1. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) TA 2015/2016 (Dapodik PKLK, 2016)

Berdasarkan Dapodik tahun 2016, mayoritas pengelolaan SLB berada di pihak swasta. Program kemandirian diberikan kepada peserta didik pada SMALB. Keberadaan SMALB ada yang berdiri sendiri dan atau satu atap dengan SDLB dan SMPLB (SLB). Jumlah SMALB tahun 2016 sebanyak 1.049 sekolah.

Di SMALB, peserta didik yang tidak memiliki kondisi kekhususan yang berat diberikan program kemandirian sehingga membantu anak mengembangkan potensinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar menjadi mandiri. Program kemandirian pada jenjang SMALB, PDBK dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi mandiri. Program kemandirian pada jenjang SMALB, PDBK dapat mengembangkan potensinya dengan memilih sesuai minat dan bakatnya maksimal 2 peminatan. Adapun program kemandirian di SMALB adalah sebagai berikut :

- 1) Tata Boga
- 2) Tata Busana
- 3) Tata Kecantikan
- 4) Pijat (Massage)
- 5) Tata Graha
- 6) Teknik Informatika dan Komputer
- 7) Teknik Penyiaran Radio
- 8) Perbengkelan Motor
- 9) Seni Musik
- 10) Seni Tari
- 11) Seni Lukis
- 12) Cetak Saring/Sablon
- 13) Suvenir
- 14) Seni Membatik
- 15) Desain Grafis
- 16) Fotografi
- 17) Elektronika Alat Rumah Tangga
- 18) Budidaya Perikanan
- 19) Budidaya Peternakan
- 20) Budidaya Tanaman

Satuan pendidikan dapat mengembangkan pilihan kemandirian sesuai dengan potensi daerah dan karakteristik, minat dan bakat peserta didik. Sebagaimana diketahui, setiap daerah memiliki potensi

daerah yang berbedabeda. Potensi daerah di Provinsi Bali tentu berbeda dengan di daerah Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Aceh tentu berbeda dengan di Provinsi DI Yogyakarta. Sebagai contoh, Daerah Brebes di Jawa Tengah memiliki potensi daerah di bidang pertanian dan peternakan dengan produksi bawang merah dan telur asinnya. Sekolah dapat mengembangkan program kemandirian PDBK terkait dengan hasil pertanian dan peternakan tersebut. Di daerah Solo, sekolah khusus memungkinkan mengembangkan program kemandirian batik. Di daerah Bali juga memungkinkan mengembangkan program kemandirian pembuatan souvenir (bidang pariwisata).

Pada tahun 2016, terdapat 11.196 peserta didik yang tersebar di 1.049 sekolah. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, jumlah kelas di SMALB bergantung pada kekhususan siswa karena model pengajaran yang guru lakukan sangat bergantung pada kekhususan siswa. Program kemandirian yang diterima siswa disesuaikan dengan kekhususan yang dipunyai oleh siswa (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kesesuaian Mata Pelajaran Kemandirian dengan Ketunaan yang dialami Siswa (Direktorat PKLK, 2016)

No.	Mata Pelajaran Kemandirian	Ketunaan				
		Tuna-netra	Tuna-rungu	Tuna-daksa	Tuna-grahita	Autis
1	Teknik Informatika dan Komputer	●	●	●	●	●
2	Masase	●	●	●		
3	Elektronika alat rumah tangga		●	●		
4	Perbengkelan Sepeda Motor		●	●	●	
5	Tata Graha		●		●	

No.	Mata Pelajaran Kemandirian	Ketunaan				
		Tuna-netra	Tuna-rungu	Tuna-daksa	Tuna-grahita	Autis
6	Tata Kecantikan		●	●	●	
7	Tata Boga		●	●	●	
8	Tata Busana		●	●	●	
9	Penyiaran Radio	●		●		
10	Seni Tari		●	●	●	
11	Seni Musik	●		●	●	●
12	Seni Lukis		●	●	●	●
13	Sablon		●	●	●	
14	Budidaya Hortikultura		●		●	
15	Budidaya Perikanan		●	●		
16	Budidaya Peternakan		●	●		
17	Fotografi		●	●		●
18	Desain Grafis		●	●		●
19	Seni Membatik		●	●	●	
20	Suvenir		●	●	●	

Pada tahun 2016 terdapat 4.196 guru yang mengajar di SMALB dan 2.098 di antaranya mengajar kemandirian. Dengan kondisi yang ada sekarang

masih terdapat kekurangan guru SMALB, termasuk di dalamnya guru yang mengajar kemandirian. Menurut Dapodik, dibutuhkan sebanyak 6.384 guru SMALB dan 5.320 guru yang mengajarkan kemandirian.

Kualitas guru juga menjadi masalah dalam proses belajar-mengajar. Guru yang mengajar program kemandirian juga tidak berarti guru-guru tersebut mempunyai sertifikat kompetensi yang berhubungan dengan kemandirian yang diajarkan. Misalnya pada program tata busana, kebanyakan guru mengikuti kursus menjahit dan ilmunya diajarkan di sekolah. Sertifikasi kompetensi guru menjadi hal yang mutlak harus disediakan agar guru-guru bisa dengan benar mengajarkan peserta didik sesuai dengan program kemandirian yang diajarkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif analitik.

Subyek penelitian adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan penelitian/ menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Subyek penelitian merupakan individu yang mengalami secara langsung suatu peristiwa, sehingga memahami konteksnya (Spreadley, 1997: 4). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SMA LB di Kabupaten Bantul.

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan mengolah data, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-18), yakni bahwa dalam teknik analisa data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dalam penulisan ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan diadakannya ajang tahunan FIKSI (Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia) dan LKSN ABK atau Lomba Keterampilan Siswa

Nasional Anak Berkebutuhan Khusus menjadi bahan kajian penting dalam membekali pendidikan bagi siswa ABK. Tujuan LKSN LB membentuk peserta didik ABK supaya terampil dan berkarakter tersebut tidak lain untuk mendorong anak-anak untuk bersikap mandiri. Kegiatan ini seperti ingin memberikan nasihat kepada mereka, bahwa untuk menjalani kehidupan ini kita tidak bisa menggantungkan kepada orang lain. Meski mereka memiliki keistimewaan secara fisik, namun itu tak boleh menjadi batasan yang membuat munculnya perasaan inferior, tidak percaya diri, dan merasa berbeda dengan orang lain. Pikiran rendah diri seperti ini perlu dihilangkan, karena untuk mencapai prestasi setiap peserta didik harus membuat karya, dan karya itu bisa diciptakan oleh siapapun, tak terbatas oleh anak yang mengalami disabilitas.

Acara Fiksi diikuti oleh sekitar lebih dari seratus peserta didik ABK dari berbagai sekolah luar biasa (SLB) di 34 provinsi. Masing-masing provinsi diwakili 5 orang, yang terdiri dari satu orang kepala SLB, dua guru SLB dan dua peserta didik SLB. Sementara itu pada LKSN ABK ada sebanyak 9 cabang keterampilan yang dilombakan, yaitu: Lomba menjahit; lomba tata boga; lomba kriya kayu; lomba membatik; lomba merangkai bunga segar; lomba hantaran; lomba kreasi barang bekas; lomba kecantikan, dan lomba keterampilan desain grafis. Kegiatan ini juga diramaikan dengan keberadaan 34 stand produk wirausaha yang dibuat para peserta didik ABK dari setiap provinsi.

LKSN ini diselenggarakan sebagai ajang evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. LKSN diharapkan bisa memotivasi sekolah dan peserta didik supaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian. Ketiga hal ini sangat penting untuk modal mereka setelah lulus sekolah nanti. Apalagi jika peserta didik ABK masuk dalam dunia kerja yang tentu membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, loyal dan profesional, sehingga, lulusan anak didik kita harus dibekali dengan tiga hal pokok itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan lebih lanjut mereka bisa berkreasi sendiri dengan mendirikan usaha secara mandiri. Itu justru bagus, dan bisa membantu membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain. selain itu dengan digelarnya FIKSI dan LKSN merupakan salah satu cara untuk membuktikan bahwa Direktorat PKLK

telah melakukan peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan sehingga anak-anak berkebutuhan khusus mampu menunjukkan keterampilan yang mereka miliki. Jika potensi mereka terus digali dan didorong oleh semua pihak, termasuk dunia pendidikan, keterampilan yang mereka miliki tidak akan kalah dengan peserta didik pada umumnya.

Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) menjadi tempat untuk menumbuhkan kembangkan potensi dan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus. Serta melalui memberikan motivasi bagi mereka untuk selalu berkreasi dan berinovasi, sehingga potensi dan keterampilannya terus terasah dan memberikan kebermanfaatkan bagi mereka.

“Dengan adanya kegiatan ini (FIKSI-red) mereka bisa saling mengenal dengan peserta lain. Sehingga mereka bisa saling memberikan motivasi dan berkreasi. ajang FIKSI merupakan bentuk pengejawantahan pendidikan vokasi yang telah dilakukan di sekolah.

FIKSI ini merupakan bukti bahwa pendidikan vokasi di sekolah luar biasa berjalan. Dengan bukti mereka memiliki keterampilan yang patut diapresiasi. Karena apa yang mereka buat juga layak untuk diperkenalkan kepada publik.

Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi yang besar jika terus digali. Khususnya dengan menggali keterampilan-keterampilan yang mereka sukai. Sekolah juga harus memberikan tempat dan fasilitas untuk menumbuhkan kembangkan keterampilan mereka.

Melihat perkembangan zaman lebih memfokuskan keterampilan pada empat bidang. Antara lain tataboga, tatabusana, hantaran dan pertanian.

Menurut data BPS 2016/2017, ada sekitar 2.070 pendidikan luar biasa, yang terdiri dari sebanyak 545 sekolah negeri dan 1.525 sekolah swasta. Kemudian, sebanyak 121.244 siswa ABK meliputi 47.399 negeri dan 73.845 swasta. Keberadaan anak-anak ini perlu dibuatkan ruang beraktualisasi yang luas sebagaimana peserta didik pada umumnya. Cara pandang pemerintah harus membuat skala prioritas bagi mereka, baik dari sisi pendidikan maupun orientasi pada lahan pekerjaan. Sebaliknya, perspektif yang dibangun jangan menjadikan keberadaan peserta didik ABK ini sebagai beban negara, karena jika ini yang dipertahankan maka

mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa bagi negara di masa mendatang.

Hingga saat ini, salah satu wujud perhatian pemerintah dalam memprioritaskan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus adalah diselenggarakannya FIKSI dan LKSN ABK. Gelaran ini diadakan setiap tahun dalam rangka menumbuhkan motivasi peserta didik ABK untuk mengembangkan kekarayaan. Lebih dari itu, pemerintah juga sudah menunaikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan vokasi bagi peserta didik ABK.

Pentingnya Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru

Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berkualitas harus mampu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kebutuhan tenaga kerja. Guru dan tenaga pendidik sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang cepat dan tuntutan standar yang makin tinggi. Tuntutan dengan diadakannya ajang FIKSI dan LKSN ABK menjadi perhatian yang sangat penting dalam menyediakan pendidikan vokasi bagi ABK. Bagaimana menyiapkan ABK untuk menghadapi tuntutan jaman terkait ketrampilan. Menyiapkan generasi yang unggul dan berkarakter ,menyiapkan anak berkebutuhan khusus menjadi juara. Yang menjadi bahan pertanyaan adalah apakah guru ABK tersebut sudah memiliki kompetensi bidang keahlian.

Secara umum, kurangnya guru dan tenaga pendidik yang berkualitas, distribusi guru yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, serta belum terpenuhinya kebutuhan guru produktif merupakan beberapa tantangan utama terkait guru di lembaga pendidikan vokasi saat ini. Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan mutu guru di pendidikan vokasi juga terkait dengan beberapa hal. Pertama, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Menurut kedua peraturan tersebut, kualifikasi akademik bagi

guru adalah S1 atau D-IV. Akan tetapi, pada tahun 2015 sekitar 12% guru masih memiliki kualifikasi akademik dibawah S-1/ D-IV. Proporsi ini lebih besar daripada guru SMA yang juga berkualifikasi akademik dibawah S-1/D-IV (7%). Kedua, masih banyak keraguan terhadap kompetensi guru di satuan lembaga pendidikan karena hasil uji kompetensi menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, guru tidak selalu memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ketiga, masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pembelajaran di lembaga pendidikan vokasi yang mengutamakan penguasaan kompetensi membutuhkan para pendidik yang memahami perkembangan usaha dan industri di luar sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman para guru pendidikan vokasi untuk terjun langsung dalam kegiatan di industri menjadi sangat penting. Apalagi magang di DUDI merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk pemutakhiran kompetensi. Magang guru di perusahaan juga dapat menguatkan kerjasama pendidikan vokasi yang bersangkutan dengan DUDI untuk kegiatan Prakerin peserta didik. Kerjasama pendidikan vokasi dan DUDI dalam bentuk magang guru telah terintegrasikan dalam instrumen akreditasi pendidikan vokasi (dalam Standar Pengelolaan). Akan tetapi, data tentang pengalaman industri guru pendidikan vokasi belum tersedia secara sistematis. Data ini dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan pembinaan guru agar lebih lebih mampu mentransfer informasi serta keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Kendala yang di hadapi oleh guru guru pendidikan ketrampilan tentang pelaksanaan pendidikan ketrampilanantara lain: (1) penetapan bahan ajardan isi materi belum sepenuhnya mengacu kebutuhan siswa. Pembelajaran lebih didasarkan padamateri di dalam kurikulum; (2) tujuan pembelajaran keterampilan sebagian besar sekolah masih sebagai mata pelajaran yang wajib dilaksanakan. Tujuan pembelajaran belum dirumuskan untuk mencapai hasil belajar keterampilan fungsional dan atau keterampilan pra-vokasional dan vokasional untuk bekal hidup pasca sekolah; (3) strategi pembelajaran keterampilan masih sebatas pembelajaran kelas keterampilan. Sebagian

besar sekolah belum menerapkan strategi pembelajaran kotrak berkolaborasi dengan orangtua siswa dan belum melakukan sistem magangkerja di lembaga atau tempat usahayangsesuai;(4)sumberbelajarbelum menggunakan replika dan atau lingkungan nyata. Media pembelajaran di sebagian besar sekolah masih terkesan seadanya dan belum dikelola dengan efektif (contoh: anak membawa peralatan dari rumah, ataumenggunakan peralatan sekolah yang belum memanfaatkan teknologi); (5) belum semua sekolah membelajarkan kemampuan pemasaran hasil kerja ABK. Hasil belajar keterampilan hanya sebatas untuk dinilai oleh guru. Artinya sekolah belum mengoptimalkan fungsi koperasi sekolah dan event-event lain untuk pemasaran produk siswa; (6) penilaian hasil belajar belum menerapkan kreteria pencapaian performansi berdasar tingkat keterampilan (tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat mahir) dan belum menerapkan uji keterampilan kerja mandiri.

Penilaian masih ada yang berorientasi untuk mengisi nilai rapor akhir semester; (7) SDM guru belum seluruhnya memiliki kompetensi penguasaan isi materi dan cara pembelajaran keterampilan ABK. Sebagian besar guru merupakan guru kelas, dan belum seluruhnya mengikuti pelatihan pedalaman penguasaan pembelajaran keterampilan ABK.

Secara umum, pendidikan seperti yang telah dibahas pada bab guru dan tenaga pendidik, SMA LB masih banyak kekurangan Guru Produktif. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan perhitungan dan berikut proyeksi kebutuhan Guru Produktif SMA LB guru yang dibutuhkan untuk mengajar program kemandirian adalah sebagai berikutsampai 2020.

Tabel 2. Kebutuhan Guru Kemandirian di SMALB (Direktorat PKLK, 2016)

Komponen	Base	Kebutuhan	Sasaran Pemenuhan Kebutuhan			
	Line 2016		2017	2018	2019	2020
Kebutuhan Tambahan PTK						
• Penyediaan Kepala Sekolah	933	948	-	-	7	8
• Penyediaan Guru SLB	3.732	5.498	566	500	400	300
• Penyediaan Guru Kemandirian	1.866	3.732	550	466	450	400

Langkah-Langkah Peningkatan Keterampilan Guru Produktif

(a) Guru Pembelajar

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (*abilities*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*). Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya.

(b) Setiap Guru Produktif Mempunyai Minimal 1 Sertifikat Keahlian Level 3 KKNI

Sertifikasi Kompetensi Kerja guru diawali dengan uji kompetensi. Uji tersebut dilakukan melalui proses penilaian (*assesment*) baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi tertentu. Uji kompetensi bersifat terbuka, tanpa diskriminasi dan diselenggarakan secara transparan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam uji kompetensi adalah valid,

reliabel, fleksibel, adil, efektif dan efisien, berpusat pada peserta uji kompetensi dan memenuhi syarat keselamatan kerja. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi terkini daripada pencapaian masa lalu, dan yang perlu di tekankan bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri.

Saat ini terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi, yaitu pertama, penerapan wajib sertifikasi. Kedua, penerapan disarankan sertifikasi (*advisory*) dan ketiga, penerapan sukarela (*voluntary*). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang teknisnya. Sesuai dengan regulasi perdagangan jasa antarnegara (WTO = *World Trade Organization*) terutama GATS (*General Agreement on Trade and Services*) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka penerapan wajib sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini. Penerapan wajib sertifikasi kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan/atau mempunyai potensi dispute besar di masyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO, karena berlaku tidak hanya kepada tenaga Indonesia, tetapi juga tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa bidang sertifikasi yang telah diterapkan wajib pada saat ini adalah pariwisata, manajemen resiko perbankan, pengawas kehutanan, penyuluh pertanian, tata laksana rumah tangga, penyuluh perikanan, inspektur keamanan pangan dan penyuluh keamanan pangan.

Sistem sertifikasi kompetensi kerja dibuat agar kredibel. Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (diklat) kejuruan/keterampilan adalah hal yang sangat penting untuk distandarkan. Diklat tersebut harus didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demand driven*); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training/ CBT*).

Penerapan sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan secara menyeluruh dan penyelenggaraan Diklat yang terstandar diharapkan menjadi salah satu “*barrier*” bagi para tenaga kerja asing yang akan “menyerbu” Indonesia. Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level kompetensi profesi guru berada pada level 7, sehingga kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru harus mencapai level 7. Disamping itu, untuk memenuhi persyaratan kompetensi keahlian, guru diwajibkan memiliki satu sertifikat keahlian level 3 (KKNI) sesuai dengan bidangnya.

Memaksimalkan Peran Pendidikan

Vokasi bagi ABK

Agar tujuan pendidikan vokasi benar-benar mampu memaksimalkan perannya dalam pengembangan peserta didik seutuhnya dan pembangunan ekonomi, perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut (selektif). Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta didik pendidikan vokasi semestinya ilmu-ilmu yang cocok untuk memfasilitasi pengembangan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagaimana disebut sebelumnya. Keduanya sama-sama diperlukan dan jangan sampai terpeleset mengorbankan salah satu. Mengorbankan pengembangan eksistensi peserta didik berarti mendehumanisasi manusia dan mengembangkan peserta didik yang tidak ada keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja, akan membuat pendidikan vokasi terisolasi dan terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, terutama dengan dunia kerja. Jika ini terjadi, maka pendidikan vokasi tidak berperan sama sekali terhadap pembangunan masyarakat. Memperkuat kemampuan soft skills peserta didik pendidikan vokasi melalui berbagai ragam cara. Secara matematis, *soft skills* = kualitas intrapersonal + keterampilan interpersonal. Kualitas intrapersonal adalah kualitas batiniah (kualitas rohaniah) manusia yang bersumber dari dalam lubuk hati manusia yang dimensi-dimensinya meliputi antara lain kerendahan hati, harga diri, integritas, tanggung jawab, komitmen, motivasi diri, rasa keingintahuan, menyukai apa yang belum diketahui (umumnya manusia menyukai apa yang sudah diketahui), kejujuran, kerajinan, kasih sayang

(cinta sesama), disiplin diri, kontrol diri, kesadaran diri, dapat dipercaya, dan berjiwa kewirausahaan dimana yang terakhir ini umumnya bersumber dari pendidikan yang memerdekakan manusia sehingga tidak tertekandan menjadi kreatif yang akibatnya menjadi inovatif dan mampu membentuk jiwa kewirausahaan manusia. Tentu saja masih banyak dimensi kualitas intrapersonal yang lain, tetapi terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia yang dimensi-dimensinya meliputi antara lain bertanggung jawab atas semua perbuatannya, sikap hormat/respek kepada orang lain, perdamaian, kecintaan kepada sesama, komunikasi yang mengena, kepemimpinan, kerjasama/kerja kelompok, kehalusan berbudi, sosiabilitas, solidaritas, toleransi/tenggang rasa, bijaksana, beradab, berani berbuat benar meskipun tidak populer, demokratis, sikap adil, sikap tertib, dan masih banyak dimensi-dimensi keterampilan interpersonal lainnya yang terlalu banyak untuk disebut satu per satu.

Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, terdapat tiga jenis satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terlibat, yaitu SMK, LKP, dan SMALB. Ketiga jenis satuan pendidikan ini mempunyai proses penyelenggaraan pendidikan yang berbeda. SMK dan SMALB berada di pendidikan formal, sedangkan LKP berada di pendidikan nonformal. Ketiga pendidikan ini berdiri secara sendiri-sendiri dalam menjalankan proses pendidikan.

Selain itu, proses pendidikan vokasi sekarang masih belum terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penyusunan kurikulum belum optimal melibatkan partisipasi DUDI sehingga proses pembangunan kompetensi tidak sesuai dengan keinginan DUDI. Selain itu, tidak adanya standarisasi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam pelaksanaan magang bersama DUDI membuat keselarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan DUDI menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam revitalisasi pendidikan vokasi ini, integrasi dan sinkronisasi antara lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi penting. Selain itu, proses penyelenggaraan pendidikan juga harus *link and match* dengan kebutuhan DUDI agar bisa dicetak lulusan yang siap untuk bekerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan seseorang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pendidikan memberikan banyak pengetahuan dan informasi yang akan membuat hidup dan perilaku semakin baik. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak memandang dari status, agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang tentang pendidikan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Berdasarkan uraian tersebut pendidikan juga berhak didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus yaitu anak dengan karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya yang mengalami kelainan pada mental, emosi, dan fisik. Anak berkebutuhan khusus diantaranya seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Mendidik anak berkebutuhan khusus memang tidak mudah untuk dilakukan. Perlu adanya tingkat kesabaran yang tinggi, didik kasih yang tinggi, mengerti psikologi anak dengan baik, dan memiliki keterampilan khusus untuk membantu tumbuh kembang dan pendidikan anak tersebut serta perlu adanya kerjasama dengan orangtua dari anak berkebutuhan khusus. Salah satu keterampilan khusus yang dimaksud seperti menguasai tulisan *Braille* untuk tuna netra dan menguasai bahasa isyarat untuk tunarungu, dan lain-lain. SLB (Sekolah Luar Biasa) adalah tempat di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Melalui pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus seterusnya akan dikembangkan yang akan berguna bagi kehidupannya karena banyak anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh anak normal pada umumnya. Dapat menjadikan anak lebih disiplin dan mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupannya. Anak dapat

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sehingga anak merasa menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dapat mewujudkan seseorang yang memiliki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kenyataannya masih banyak orang yang melihat anak berkebutuhan khusus dengan sebelah mata. Di dalam masyarakat anak berkebutuhan khusus sering diabaikan, dicemooh sehingga dianggap tidak berguna. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus adalah sebuah aib sehingga anak takut untuk bersosialisasi. Seharusnya kita tidak melakukan hal tersebut, namun sebaliknya kita dapat merangkul dan menerima anak berkebutuhan khusus sama seperti anak normal pada umumnya. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sehingga hak-haknya terpenuhi sebagaimana anak normal lainnya.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat karena melalui pendidikan anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus pun berhak mendapatkan pendidikan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kekurangan. Dimata Tuhan semua orang sama yang membedakan hanya ketakwaan.

Pendidikan vokasi dapat berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi jika keselarasannya dengan dunia kerja di sekitarnya diupayakan secara terus-menerus, baik dalam dimensi kuantitas, kualitas, lokasi, maupun waktu. Pendidikan vokasi juga akan berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi jika mampu mengintegrasikan program-programnya dengan keberadaan regulasi, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah di era otonomi daerah seperti saat ini.

Menggabungkan antara pemasalahan, keberhasilan dan telaah konseptual tentang pembelajaran keterampilan untuk ABK, maka perlu dibahas tentang model pembelajaran keterampilan bagi ABK yang berorientasi untuk mengembangkan kemampuan menolong diri dan kemampuan vokasional (keterampilan ekonomi) agar ABK dapat mencapai kemandirian beradaptasi. Beberapa sub aspek yang akan di bahas tentang paradigma model pembelajaran keterampilan ABK,

pengembangan kurikulum pembelajaran keterampilan, dan pengelolaan pembelajarannya. Sebagai contoh Pembelajaran Keterampilan dan Kecakapan Hidup Bagi ABK.

Saran

Bagi guru, hendaknya lebih banyak memberikan dukungan bagi siswa untuk mendalami ketrampilan / vokasi sebagai bekal siswa setelah lulus sekolah. Selain itu guru juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi,

serta memiliki sertifikat kompetensi keahlian. Bagi siswa SMA LB, diharapkan mengikuti uji kompetensi keahlian untuk dijadikan sebagai syarat pendukung untuk memasuki dunia kerja. Bagi Pemerintah, hendaknya menjadi bahan kajian lebih mendalam tentang wacana membuka sekolah vokasi bagi siswa luar biasa. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa lulusan SMA LB untuk diterima bekerja pada dunia usaha dan dunia industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. *Good Practice in Technical and Vocational Education and Training*. Manila, Philipina: Asian Development Bank.
- _____. 2010. *Penyelarasan Pendidikan, Pelatihan dengan Dunia Kerja*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- _____. 2010. *Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- _____. 2008. *Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Becker, G.S. 1964. *Human Capital*. New York, NY.: National Bureau of Economic Research.
- Boediono & McMahon. 2001. *Pembangunan Pendidikan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi 1994. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Psacharopoulous, G. 1997. "Vocational Education and Training Today: Challenges and Responses". *Journal of Vocational Education and Training*, 49 (3), h.385-393.
- Slamet PH. 2010. "Kewirausahaan". Makalah Penataran Pengawas Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. 202 Cakrawala Pendidikan, Juni 2011, Th. XXX, No. 2
- _____. 2010. *Peran Pendidikan Vokasi di Era Otonomi Daerah* (Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda Angkatan IX Tahun 2010 STMIK Bina Patria Magelang Pada 18 Desember 2010 di Magelang).
- _____. 2010. "Personal Characters Required by the Workplaces". *Paper Presented at the International Seminar on Vocational Education and Training*. Jogjakarta: Jogjakarta State University.
- _____. 2009. "Pengintegrasian Hard Skills and Soft Skills dalam Kurikulum." *Makalah Dipresentasikan pada Seminar Internasional dengan tema "Pengintegrasian Hard Skills dan Soft Skills"*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Spradley, J.P. 1997. *Metode Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.